

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III telah dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis penelitian. Bab IV menjabarkan secara rinci mengenai output pengolahan data yang dilakukan serta pembahasan mengenai output data penelitian berupa analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis.

#### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011). Data akan disajikan dalam bentuk statistik deskriptif sebelum dilakukan pengujian untuk memberikan gambaran umum mengenai data variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1.**

#### Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	n	Minimum	Maximum	Median	Mean	Std. Deviation
LN BM	120	23,96	27,62	26,11	26,0975	,47874
LN DAU	120	26,60	27,92	27,47	27,4179	,29830
LN JP	120	11,22	15,12	13,70	13,5887	,66904
LN DAK	120	20,15	25,43	24,81	24,6222	,70872

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Nilai minimum dan maksimum belanja modal pada kabupaten/kota di Jateng dan DIY adalah sebesar 23,96 dan 27,62. Nilai minimum terjadi pada Kota Salatiga sebesar 23,96 atau Rp. 25.458.694.442,00 sedangkan nilai belanja

modal tertinggi sebesar 27,62 atau Rp.990.118.124.350,- terjadi pada Kota Semarang. Nilai rata-rata belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 26,0975 atau Rp. 215.774.560,887,-. Nilai median dari variabel belanja modal adalah sebesar 26,11 dengan nilai standar deviasi dari variabel belanja modal adalah sebesar 0,47874.

2. Nilai minimum dan maksimum dana alokasi umum pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 26,60 atau Rp. 358.331.867.000,- dan 27,92 atau 1.332.536.848.000,-. Nilai minimum DAU diperoleh kota Salatiga sedangkan nilai maksimum DAU diperoleh Kabupaten Cilacap. Nilai rata-rata DAU diartikan sebagai tingkat kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah sebesar 27,4179 atau Rp. 808.058.262.563,-. Nilai median dari variabel DAU adalah sebesar 24,8061 dengan nilai standar deviasi dari variabel DAU adalah sebesar 0,29830.
3. Nilai minimum dan maksimum dana alokasi khusus (DAK) pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 20,15 atau Rp. 561.100.000,- dan 25,43 atau Rp. 110.203.960.000,-. Nilai minimum DAK diperoleh kota Yogyakarta dan nilai maksimum diperoleh Kabupaten Cilacap. Nilai rata-rata dana alokasi khusus (DAK) diartikan sebagai dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional adalah sebesar 24,6222 atau Rp. 49.349.822.201,-. Nilai median dari variabel DAK adalah

sebesar 24,8061 dengan nilai standar deviasi dari variabel DAK adalah sebesar 0,70872.

4. Nilai minimum dan maksimum jumlah penduduk pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 11,22 atau 74309 Jiwa dan 15,12 atau 3691196 Jiwa. Nilai minimum jumlah penduduk diperoleh Kabupaten Batang sedangkan nilai maksimum diperoleh Kota Yogyakarta. Nilai rata-rata jumlah penduduk adalah sebesar 13,5887. Nilai median dari variabel jumlah penduduk adalah sebesar 13,7023 dengan nilai standar deviasi dari variabel jumlah penduduk adalah sebesar 0,66904.

#### **4.2 Uji Asumsi Klasik**

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

##### **4.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi data yang normal atau tidak dengan uji yang dipakai adalah *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikan  $\alpha=0,05$ . Apabila Sign hitung  $> \alpha$ , maka data terdistribusi normal. Sedangkan, jika sebaliknya maka data tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2.**

**Output Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
n	120
Kolmogorov-Smirnov Z	,636
Asymp. Sig. (2-tailed)	,813

Sumber: Output SPSS Diolah ,2016

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov seperti pada tabel 4.2. terlihat bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0,813 lebih tinggi daripada  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian data penelitian dalam model penelitian ini dapat dinyatakan normal.

#### **4.2.2 Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas adalah hubungan antara variabel prediktor atau independen terhadap variabel prediktor yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 atau nilai *tolerance* >0,10 maka model regresi berganda tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011).

**Tabel 4.3.**

**Output Uji Multikolinearitas**

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
LN DAU	,293	3,408	Tidak ada Multikolinieritas
LN JP	,354	2,824	Tidak ada Multikolinieritas
LN DAK	,728	1,373	Tidak ada Multikolinieritas

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Dari hasil tabel 4.3., dapat diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian ini.

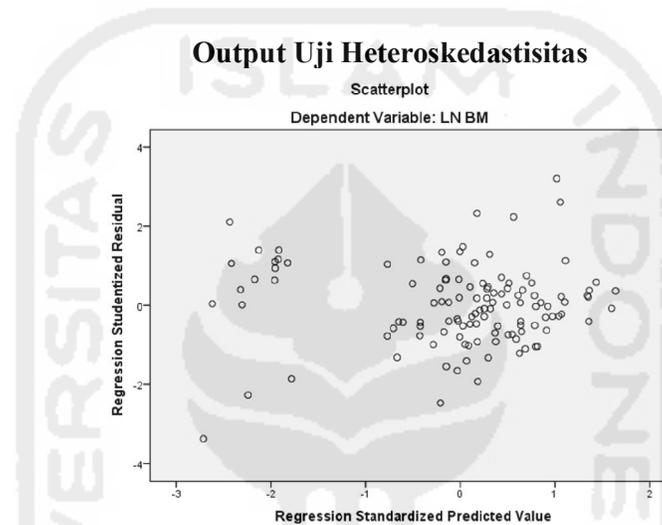
#### **4.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian heterokedastisitas tujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian variabel dari satu pengamatan kepengamatan yang lainnya tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas terjadi bila *distrurbance term* untuk setiap observasi tidak lagi konstan, tetapi bervariasi. Perhitungan heterokedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah dengan metode Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Apabila terjadi pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, dan apabila tidak ada pola penyebaran maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011)

Hasil Uji Heteroskedastisitas tersebut dapat di ditunjukkan pada Gambar berikut:

**Gambar 4.4.**



Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Dari gambar 4.1. diatas dapat diketahui bahwa sebaran data residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu 0 Y dan tidak ada pola tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### **4.2.4 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan pada periode  $t$  dengan pelanggaran pada periode  $t - 1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Tes ini dilakukan karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*, dimana data tersebut diketahui bahwa dalam jenis masalah *reoccurring* autokorelasi dapat

"mengganggu" antar data (Ghozali, 2011). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.5.**

**Output Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,654 <sup>a</sup>	,427	,413	,38108	1,856

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Dari hasil tabel 4.4. di atas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,856. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai  $d_l$  dan  $d_u$  pada tingkat signifikansi 5%, dengan  $n$  sebesar 120 dan  $k= 3$ . Dengan menggunakan standar tersebut dihasilkan nilai  $d_l$  sebesar 1,63731 dan  $d_u$  sebesar 1,74715. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,856 berada diantara  $d_u$  (1,74715) dan  $4-d_u$  ( $4-1,74715= 2,25285$ ) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi.

**4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Hasil uji regresi linier berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.6.**

**Output Regresi Berganda**

Variabel Independen	Koefisien Regresi	T hitung	Signifikansi	Kesimpulan
Konstanta	-1,300	3,858	,774	
LND AU	0,834	3,858	0,000	H1 didukung
LNJP	0,003	0,029	0,977	H2 tidak didukung
LND AK	0,182	2,874	0,005	H3 didukung
Fhitung		28,863	0,000 <sup>b</sup>	
Adjusted R Square		0,413		

Variabel Dependen : LNBM

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Keterangan

BM : Belanja Modal

DAU : Dana Alokasi Umum

JP : Jumlah Penduduk

DAK : Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat diperoleh model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{LNBM} = -1,300 + 0,884\text{LNDAU} + 0,003\text{LNJP} + 0,182\text{LND AK}$$

Dari hasil model persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Nilai *intercept konstanta* sebesar -1,300. Hasil ini dapat diartikan, apabila besarnya nilai seluruh variabel independen sama dengan nol, maka besarnya belanja modal adalah -1,300.
2. Koefisien regresi LNDAU= 0,884. Hasil ini dapat diartikan, apabila dana

alokasi umum mengalami peningkatan 1 persen, maka besarnya modal akan meningkat sebesar 0,884 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

3. Koefisien regresi LNJP= 0,003. Hasil ini dapat diartikan, apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,003, dengan asumsi semua variabel independen konstan.
4. Koefisien regresi LNDAK = 0,182. Hasil ini dapat diartikan, apabila dana alokasi khusus mengalami peningkatan 1 persen, maka besarnya modal akan meningkat sebesar 0,182 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

#### **4.3.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena  $R^2$  mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted*  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted*  $R^2$  semakin mendekati 1 maka

makin baik kemampuan model tersebut menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.5

Hasil analisis koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,413. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel *independent* dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 41,3% dan sisanya sebesar 58,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

#### **4.3.2 Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ( $\alpha=5\%$ ).

##### **1. Pengujian Hipotesis pertama**

Pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel DAU. Hipotesis  $H_1$  penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi DAU yaitu 0,834 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sehingga  $H_1$  penelitian ini diterima.

## 2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel jumlah penduduk. Hipotesis H<sub>2</sub> penelitian ini menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Besarnya koefisien regresi jumlah penduduk yaitu 0,003 dan nilai signifikansi sebesar  $0,977 > 0,05$ . Hal ini berarti variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sehingga H<sub>2</sub> penelitian ini ditolak.

## 3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel dana alokasi khusus. Hipotesis H<sub>3</sub> penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi dana alokasi khusus yaitu 0,182 dan nilai signifikansi sebesar  $0,005 < 0,05$ . Dengan demikian H<sub>4</sub> penelitian ini didukung.

## 4.4 Pembahasan

### 4.4.1 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAU akan meningkatkan belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka

berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006, dalam Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Variabel DAU berpengaruh terhadap anggaran belanja modal hal ini kemungkinan disebabkan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Hasil ini sesuai dengan penelitian Adiwiyana (2012) yang menemukan hasil DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Kusnandar dan Siswanto (2012) yang menemukan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

#### **4.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar kecilnya jumlah penduduk tidak mempengaruhi belanja modal.

Hal ini kemungkinan disebabkan karena sarana prasarana dan infrastruktur pembangunan yang ada selama lima tahun terakhir ini masih layak dan memadai sehingga pemerintah daerah khususnya wilayah DIY dan Jateng tidak mengeluarkan anggaran untuk penambahan sarana prasarana maupun pembangunan sehingga jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Devita et.al (2015) yang meneliti di daerah Jambi dan penelitian Herlina (2013) yang meneliti di daerah Kabupaten Berau, Kalimantan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Budi (2013) di Pulau Jawa dan Widiagma (2013) di daerah Jawa Timur yang membuktikan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

#### **4.4.3 Pengaruh DAK terhadap Belanja modal.**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAK akan meningkatkan belanja modal.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Bappenas, 2011).

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011).

Penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya

menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Bappenas,2011).

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Permatasari dan Midalwati, 2016).

Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten Kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan

pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Wandira, 2013).

Hasil ini sesuai penelitian Wandira (2013) yang menemukan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar(2011) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.

